

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
--	--

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	Persentase	100	0	0	0
1.2	Indikator 1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT	Persentase	100	20	20	20
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85	10	10	11,76
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,7 dari 4	120

	dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional					
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	92	20	20	21,73

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat

Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam

mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi regional yang menghasilkan komitmen konkret.

Efektivitas kerja sama ekonomi regional diukur berdasarkan jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati. Komitmen tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan negara mitra pada forum regional di mana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator dan ketua pelaksanaannya.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2026 sebanyak 5 Komitmen sebagai berikut:

1. Komitmen Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
2. Komitmen Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
3. Komitmen Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
4. Komitmen Hasil BIMP-EAGA Summit ke-17;
5. Komitmen Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah Komitmen}}{\text{Target Komitmen (5)}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 0% ditentukan berdasarkan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2026 dan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati masih tercatat sebesar 0% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	Persentase	100%	0%	0%

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati merupakan *direct cascading* dari Indikator Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen. IKU ini ditargetkan sebesar 100%.

Sampai dengan laporan ini disusun, komitmen yang disepakati pada kerja sama ekonomi regional tercatat sebesar 0%. Hal ini disebabkan capaian indikator baru dapat dinilai setelah seluruh komitmen yang menjadi dasar pengukuran telah disepakati. Hingga Triwulan I Tahun 2026, hasil komitmen pada pertemuan *High Level Task Force on ASEAN Economic Integration* (HLTF-EI) dan *APEC Economic Committee* (EC) masing-masing baru menghasilkan satu dari dua komitmen yang ditargetkan pada Tahun 2026.

Komitmen yang Disepakati pada triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Hasil Pertemuan High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) ke-49

Rangkaian Pertemuan HLTF-EI ke-49 telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Februari 2026 di Iloilo City, Iloilo, Filipina. Pertemuan dipimpin oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 dan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, Kemenko Perekonomian selaku *alternate* HLTF-EI *lead* Indonesia. Turut hadir memperkuat Delegasi RI yakni perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri; Atase Perdagangan Manila; dan perwakilan Direktorat Perundingan ASEAN, Kementerian Perdagangan.

Pertemuan diawali dengan *Roundtable on ASEAN Economic Security* pada tanggal 25 Februari 2026, lalu dilanjutkan dengan pertemuan HLTF-EI ke-49 di tanggal 26 s.d. 27 Februari 2026. Pada *Roundtable on ASEAN Economic Security* menggarisbawahi perlunya *shared understanding* di tingkat ASEAN mengenai konsep *economic security* dan mencatat *key recommendation* yang dihasilkan.

Pertemuan HLTF-EI ke-49 mendukung secara prinsip terhadap 19 *Priority Deliverables* (PEDs) yang diusung Filipina pada masa keketuaan tahun 2026. Selain itu, pertemuan mencatat hasil rekomendasi ASEAN *Goeconomic Task Force* (AGTF) pada ASEAN *Goeconomic Report* dan menegaskan pentingnya keberlanjutan wadah diskusi berbentuk platform 1.5 yang secara khusus membahas isu-isu geoekonomi. Pertemuan juga membahas isu strategis lainnya yaitu *Assessment of NTMs/NTBs in ASEAN*, *Perkembangan Global and Regional Economic Development*, Tindak Lanjut AGTF dan *Review of the ToR of HLTF-EI*, *Supplementary Non-Paper on Refining AEC Calendars*, *Post-2025 AEC Monitoring and Evaluation*, dan pembahasan konsep MoU ASEAN-ADB, serta Rekomendasi HLTF-EI kepada Menteri Ekonomi ASEAN (AEM).

Adapun Rekomendasi kepada ASEAN Economic Ministers (AEM) antara lain:

- Mendorong pengembangan pemahaman bersama ASEAN mengenai *economic security* yang berlandaskan integrasi, keterbukaan, dan kerja sama;

- Menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, transparan, dapat diprediksi, dan berbasis aturan, serta menugaskan SEOM untuk memantau perkembangan kebijakan perdagangan global dan dampaknya terhadap perekonomian ASEAN;
- Menyepakati penguatan koordinasi ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (MC14) untuk menyampaikan pandangan bersama mengenai agenda reformasi WTO;
- Mendukung implementasi *Priority Economic Deliverables* (PEDs) Keketuaan ASEAN Filipina 2026 serta mendorong penyampaian laporan kemajuan secara berkala oleh badan sektoral;
- Memperkuat peran strategis HLTF-EI melalui peninjauan nomenklatur dan *Terms of Reference* (ToR) agar selaras dengan perkembangan AEC pasca-2025;
- Menyepakati pengaturan sementara ASEAN *Goeconomic Group* (AGG) sebagai platform Track 1.5 hingga disepakatinya ToR yang baru, serta melanjutkan pembahasan ASEAN Economic Security Framework;
- Mendukung implementasi *Roadmap to Implement the Guiding Principles to Refine the AEC Calendar of Meetings* guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertemuan AEC;
- Mendukung implementasi AEC *Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning* (MEAL) *Framework* 2045, termasuk sosialisasi dan penguatan kapasitas bagi badan sektoral; dan
- Mendorong pemanfaatan *Memorandum of Understanding* (MoU) ASEAN–ADB untuk mendukung agenda integrasi ekonomi ASEAN.

2. Komitmen Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1

Economic Committee (EC) adalah salah satu dari tiga komite dalam struktur organisasi APEC, yang antara lain bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama *high-cost economy*, yang berimplikasi pada rendahnya daya saing suatu ekonomi dalam perdagangan dan investasi lintas batas. Pertemuan dilaksanakan oleh setingkat Pejabat Senior. Target yang ditetapkan adalah pemanfaatan forum APEC dalam rangka peningkatan reformasi struktural di Indonesia.

Pertemuan APEC EC ke-1 2026 telah dilaksanakan di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada 8-9 Februari 2026. Ketua Delegasi RI dipimpin oleh perwakilan dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua EC, Dr James Ding (Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok), dan dihadiri oleh 18 dari 21 ekonomi anggota (Chili, Meksiko, dan Papua Nugini tidak hadir). Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat APEC, *Policy Support Unit* (PSU), PECC, dan OECD.

Berdasarkan *report by the chair* EC ke-1 2026 yang telah disirkulasikan pada Februari 2026, pertemuan berhasil membahas rencana implementasi *Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform* (SEAASR) perkembangan APEC *Economic Policy Report* (AEPR) 2025 dan 2026, serta diskusi dan rencana restrukturisasi *Friends of the Chair* (FotC).

Proyeksi capaian pada triwulan I tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2025. Realisasi triwulan I dapat tercapai sesuai dengan nasional

kalendar kegiatan kerja sama ekonomi regional tahun 2026, di mana sejumlah forum kerja sama ekonomi regional telah mulai dilaksanakan. Dengan demikian, diprediksikan Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati dapat terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Rapat Persiapan Substansi Pertemuan HLTF-EI ke-49 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 secara <i>hybrid</i> .
2.	Menghadiri Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Pertemuan HLTF-EI ke-49 telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Februari 2026 di Iloilo City, Iloilo, Filipina.
3.	Menyusun Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Penyusunan Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN telah dilaksanakan pada 27 Februari 2026 yang merupakan <i>outcome</i> dari Pertemuan HLTF-EI ke-49.
4.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Rapat Koordinasi Persiapan APEC <i>Senior Officials Meeting</i> (SOM 1) yang telah

			dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026.
5.	Menghadiri Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Pertemuan APEC EC ke-1 2026 telah dilaksanakan di Guangzhou, RRT pada 8-9 Februari 2026.
6.	Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Penyusunan Rekomendasi kepada <i>Senior Official Meeting</i> dalam bentuk <i>Report by the Chair of the Economic Committee on EC1 2026</i> pada 9 Februari 2026 yang merupakan <i>outcome</i> dari Pertemuan APEC EC1.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penyampaian AEPR 2026: *Structural Reform and AI-Driven Digital Transformation Individual Economy Report (IER) Questionnaire* pada 17 Maret 2026 kepada APEC Policy Support Unit (PSU).
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretariat ASEAN, serta kementerian/lembaga terkait dalam rangka pendalaman substansi, penyusunan masukan terhadap dokumen pembahasan, dan penyelesaian kebutuhan administrasi pelaksanaan forum kerja sama ekonomi regional.
3. Melakukan koordinasi dengan Filipina selaku tuan rumah penyelenggara, termasuk panitia pelaksana dan *Liaison Officer* (LO), guna mendukung kelancaran pelaksanaan pertemuan HLTF-EI ke-49.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang ikut menjadi DELRI pada pertemuan, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 39.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan forum kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan II-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Isu-isu yang dibahas dalam forum HLTF-EI bersifat lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi dan penyelarasan posisi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.
2. Pada rangkaian pertemuan HLTF-EI ke-49 terdapat agenda baru berupa *Roundtable Discussion* yang belum pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga memerlukan pendalaman substansi serta penyusunan bahan pembahasan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait melalui rapat persiapan guna menyusun dan menyelaraskan posisi Indonesia terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam forum HLTF-EI dan APEC EC.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta Sekretariat ASEAN untuk memperoleh informasi dan masukan dalam penyusunan bahan *Roundtable Discussion* dalam rangkaian Pertemuan HLTF-EI ke-49.

1.2. Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur persentase penyelesaian rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri *Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada saat Indonesia berperan sebagai *host country*. Penetapan indikator ini secara terpisah dari IKU efektivitas kerja sama ekonomi regional dilakukan untuk mencerminkan peningkatan peran, tanggung jawab, dan kompleksitas koordinasi Indonesia dalam penyelenggaraan forum PTM IMT-GT.

Sebagai *host*, Indonesia tidak hanya berperan dalam perumusan substansi kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan kesiapan agenda, koordinasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi pelaksanaan pertemuan, serta kesinambungan proses pengambilan keputusan di tingkat menteri. Oleh karena itu, penyelesaian rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ditetapkan sebagai indikator kinerja tersendiri yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kerja sama ekonomi regional.

IKU dinyatakan tercapai apabila seluruh rencana aksi Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT terlaksana. Adapun rencana aksi yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 dengan K/L terkait;
4. Penyusunan Kertas Posisi Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
5. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
6. Penyusunan Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
7. Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32;
8. Publikasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32; dan
9. IMT-GT Advisory Committee Meeting.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyelesaian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi yang terlaksana}}{\text{Jumlah Rencana Aksi yang ditargetkan (9)}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 20% ditentukan berdasarkan nasional kalender forum kerja sama ekonomi regional tahun 2026 dan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT yang telah terealisasi sebesar 20% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT	Persentase	100%	20%	20% (Memuaskan)

Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT merupakan *direct cascading* dari Indikator Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen. IKU ini ditargetkan sebesar 100%. Sampai dengan laporan ini disusun, perkembangan rencana aksi Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT yang telah terlaksana sebesar 20%.

Progress Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT pada triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Persiapan penyelenggaraan telah dilakukan beberapa kali, utamanya melalui kunjungan Bapperida Provinsi Sumatera Utara selaku PIC penyelenggara di daerah ke Kantor Kemenko Perekonomian selaku Sekretariat Nasional, maupun kunjungan Kemenko Perekonomian ke Bapperida Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui beberapa pertemuan secara daring.

Sebagai tindak lanjut, telah dilaksanakan kunjungan *advance* untuk survei calon lokasi kegiatan ke beberapa hotel di kota Medan pada 22 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang paling sesuai serta berkoordinasi dengan pihak hotel mengenai fasilitas, kapasitas ruang pertemuan, jumlah dan tipe kamar, serta ketersediaan area untuk pameran. Tim juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kondisi lokasi dan hotel-hotel yang akan menjadi *designated hotel* bagi delegasi. Berdasarkan hasil survei, kegiatan direncanakan akan diselenggarakan di Hotel Adimulia.

2. Menyusun Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT

Laporan hasil koordinasi dan kunjungan *advance* telah selesai disusun. Selanjutnya, diperlukan tindak lanjut terkait persiapan penyelenggaraan, khususnya mengenai pembentukan tim panitia teknis, kepastian anggaran, dan penyelesaian aspek teknis dan administratif lainnya.

Selain itu, sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan PTM IMT-GT, Kemenko Perekonomian juga turut menghadiri IMT-GT *Strategic Planning Meeting* yang diselenggarakan di Bangkok pada 24-26 Februari 2026. Pada pertemuan tersebut, *working group* mengusulkan proyek dan program yang akan dilaksanakan selama periode 2026.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2025. Realisasi triwulan I dapat tercapai sesuai dengan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2026 dimana beberapa forum kerja sama ekonomi regional telah mulai dilaksanakan maka diprediksikan Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati dapat terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Penyelesaian Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terlaksana	Koordinasi persiapan telah dilaksanakan melalui kunjungan <i>advance</i> lokasi dan ke kantor Bapperida Sumatera Utara pada 22 Januari 2026.
2.	Menyusun Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PTM IMT-GT	Terlaksana	- Laporan kunjungan <i>advance</i> - Laporan IMT-GT Strategic Planning Meeting 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Berpartisipasi pada pertemuan *IMT-GT Strategic Planning Meeting* serta menjadi *chair* pada beberapa pertemuan demi memastikan kepentingan Indonesia tetap terwakili pada kerangka kerja sama subregional, mengingat beberapa kementerian/lembaga anggota *working group* Indonesia tidak dapat mengirimkan delegasi.
2. Menyusun draf awal Surat Keputusan (SK) Tim Teknis Panitia.
3. Menyiapkan dokumen administrasi pendukung yang diperlukan antara lain *draft general information*, konsep *early notification*, draf undangan, dan dokumen pendukung lainnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan pengalihan alokasi anggaran. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang ikut menjadi DELRI pada pertemuan IMT-GT *Strategic Planning Meeting* sebanyak hanya 3 orang, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 27.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk penyelenggaraan PTM IMT-GT yang akan dilaksanakan pada triwulan III.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terjadi pergeseran alokasi anggaran yang mengakibatkan belum adanya kepastian jumlah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan PTM IMT-GT.
2. Persiapan penyelenggaraan masih memerlukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, hotel penyelenggara, serta kementerian/lembaga terkait untuk finalisasi aspek teknis dan administratif.
3. Beberapa dokumen pendukung penyelenggaraan, termasuk pembentukan Tim Teknis Panitia dan dokumen administrasi lainnya, masih dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama untuk memperoleh kepastian *secure* anggaran.
2. Mempercepat koordinasi dengan Bapperida Provinsi Sumatera Utara, pihak hotel, dan instansi terkait guna memastikan kesiapan teknis penyelenggaraan PTM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Mempercepat penyelesaian pembentukan Tim Teknis Panitia serta finalisasi dokumen administrasi penyelenggaraan, termasuk *General Information*, *Early Notification*, dan draf undangan.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. *Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada*

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan**

Kerja Sama Ekonomi Regional

perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap tiga sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, yaitu:

- 1) Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - Penandatanganan DEFA;
 - Penyelesaian Substansial ACAFTA.
- 2) Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
 - Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2026 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT;
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
 - Joint Statement BIMP-EAGA Summit ke-17;
 - Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026
- 3) Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
 - Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA;
 - Pengesahan Protokol ASEAN-MNP.

Rekomendasi kebijakan yang dimaksud mencakup: penyelesaian komitmen yang telah disepakati, partisipasi aktif dalam forum regional, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil forum. Produk keluaran dari proses ini antara lain berupa: notula rapat, *policy brief*, dokumen rekomendasi kebijakan, laporan kegiatan, hingga laporan evaluasi kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

$$\begin{aligned} \% \text{ efektivitas SKP} &= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} \\ &+ \% \text{ Tahapan keempat} \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan I sebesar 10% ditentukan

berdasarkan nasional kalender forum kerja sama Regional tahun 2026 dan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional yang telah terealisasi sebesar 10% atau mencapai 11,76% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85%	10%	11,76 % (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan *direct cascading* dari Indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85%.

Persentase Efektivitas merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pada kerja sama ekonomi Regional. Sampai dengan laporan ini disusun, penyelesaian komitmen, keikutsertaan pada forum, dan implementasi kebijakan pada kerja sama ekonomi Regional telah terlaksana sebesar 10%.

Progress capaian kinerja pada triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi PTA/FTA/CEPA

- Perundingan DEFA

Pada triwulan I telah dilaksanakan Pertemuan ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) *Negotiating Committee* (NC) yaitu:

- 1) Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-16 pada 13-17 Januari 2026 di Bangkok, Thailand.
- 2) Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-17 pada 25-26 Februari 2026 secara virtual.
- 3) Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-18 pada 8-10 Maret 2026 di Taguig City, Filipina.

Hingga Putaran ke-18, telah diselesaikan 135 dari 165 paragraf atau sekitar 81,82% dari keseluruhan teks. Sementara itu, untuk pasal substansial, telah disepakati 119 dari 133 paragraf atau sekitar 89,47%. Pasal yang masih memerlukan konsultasi domestik bagi seluruh AMS terkait *Entry Into Force (EIF) Provision* dan *Relation to Other Agreement Provision*, yang akan dibawa pada pertemuan AEM ke-32 tanggal 13 Maret 2026.

- **Legal Scrubbing DEFA**

Pada rangkaian Pertemuan DEFA ke-18 dilaksanakan juga pertemuan *2nd Legal Expert Meeting (LEM)* dalam rangka *legal scrubbing text* ASEAN DEFA, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Akan dimintakan arahan lebih lanjut dalam pertemuan DEFA LEM untuk menyelesaikan *legal scrubbing* terhadap seluruh *agreed* teks ASEAN DEFA, dan juga melakukan revisi *drafting guidelines* untuk menyesuaikan kebutuhan teks ASEAN DEFA.
- b. Pertemuan mencatat terdapat inkonsistensi pada teks ASEAN DEFA dalam penggunaan *term "Party/Parties"* dan *"Member State/Member States"* saat merujuk pada para pihak dalam perjanjian. LEM menyepakati untuk menggunakan *term "Member States/Member State"*, mengingat pada praktiknya *term* tersebut lebih umum digunakan pada teks perjanjian ASEAN, akan tetapi LEM tetap akan menunggu hasil kesepakatan DEFA NC mengenai penggunaan *term* tersebut terutama pada bagian teks *Preamble*.
- c. Pertemuan LEM juga mengidentifikasi beberapa isu teknis dalam proses *legal scrubbing* NC secara intersesi. Isu teknis tersebut berkaitan dengan penggunaan *term "to this end"*, penggunaan *"among"* dan *"between"* untuk merujuk hubungan antar ASEAN *Member States*; penggunaan *"include"* dan *"but not limited to"*; konsisten penggunaan *"laws and regulations"* dan *"laws or regulations"*; serta penggunaan terminologi teknis seperti *"service/services"*, *"law/laws"*, dan *"electronic format/electronic form"*.

2. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

- **Pertemuan HLTF-EI ke-49**

Rangkaian Pertemuan HLTF-EI ke-49 telah dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2026 di Iloilo City, Iloilo, Filipina. Pertemuan dipimpin oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 dan dihadiri oleh seluruh perwakilan negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Delegasi RI

dipimpin oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, Kemenko Perekonomian selaku *alternate* HLTF-EI *lead* Indonesia. Turut hadir memperkuat Delegasi RI yakni perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri; Atase Perdagangan Manila; dan perwakilan Direktorat Perundingan ASEAN, Kementerian Perdagangan.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian dengan K/L terkait dari hasil pertemuan antara lain:

1. Mengawal implementasi rekomendasi hasil *roundtable discussion* dan memastikan keberlanjutan *Track 1.5* sebagai forum pembahasan isu geoekonomi dan *economic security* secara terintegrasi.
2. Menyusun masukan mengenai *high impact sector* dalam *Assessment of NTMs/NTBs in ASEAN*.
3. Memantau perkembangan dinamika ekonomi global dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis dalam menanggapi hal tersebut.
4. Memonitor dan melaporkan secara berkala perkembangan, implementasi, dan capaian PED Filipina 2026.
5. Melakukan koordinasi terkait pembentukan *platform Track 1.5* serta perlunya memberikan pandangan dan masukan atas konsep ToR yang akan dikembangkan oleh Filipina.
6. Melakukan koordinasi terkait perubahan ToR baru untuk HLTF-EI
7. Memberi pandangan dan masukan terhadap dokumen AEC MEAL framework yang dikembangkan sebelum diadopsi oleh AEC Council
8. Menginventarisasi capaian konkret dan proyek berjalan Indonesia dalam kerangka Carbon Neutrality, Circular Economy, dan Blue Economy.
9. Menelaah substansi draf MoU ASEAN-ADB 2026-2030 dan menyampaikan posisi/masukan Indonesia sebelum batas waktu yang ditetapkan.

- **Pertemuan APEC Economic Committee ke-1**

Pertemuan APEC EC ke-1 2026 telah dilaksanakan di Guangzhou, RRT, pada 8-9 Februari 2026. Berdasarkan *report by the chair* EC ke-1 2026. Berdasarkan *report by the chair* EC ke-1 2026 yang telah disirkulasikan pada Februari 2026, pertemuan berhasil membahas rencana implementasi *Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform* (SEAASR) perkembangan APEC Economic Policy Report (AEPR) 2025 dan 2026, serta diskusi dan rencana restrukturisasi *Friends of the Chair* (FotC).

3. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian

- **Pembahasan dan Finalisasi Substansi RPerpres Protokol Kedua AANZFTA dan ASEAN-MNP sebelum Proses Harmonisasi**

Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan *2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dan *Protocol to Amend the ASEAN Agreement on the Movement of Natural*

Persons (ASEAN-MNP) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Protokol Kedua AANZFTA diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan dibandingkan Persetujuan AANZFTA sebelumnya melalui penguatan ketahanan rantai pasok, peningkatan liberalisasi perdagangan jasa dan penanaman modal, dukungan terhadap perdagangan digital, serta peningkatan partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional. Sementara itu, Protokol ASEAN-MNP bertujuan menyelaraskan format jadwal komitmen (*Schedules of Commitments*) menjadi *common format* untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah implementasi komitmen ASEAN tanpa mengubah komitmen Indonesia yang telah berlaku.

Perkembangan Protokol Kedua AANZFTA

Dalam rangka penyelesaian RPerpres Protokol Kedua AANZFTA, telah diputuskan bahwa pengesahan Protokol Kedua AANZFTA dilakukan melalui Peraturan Presiden. Selanjutnya, telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pembubuhan paraf anggota PAK setelah terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan PAK Penyusunan RPerpres Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA.

Perkembangan Protokol ASEAN-MNP

Dalam rangka penyelesaian RPerpres ASEAN-MNP, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyampaikan dukungan terhadap pengesahan *Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement* kepada Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, telah dilaksanakan rapat persiapan dan finalisasi bahan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bagian dari proses pengesahan Protokol ASEAN-MNP. Protokol tersebut merupakan amandemen terhadap Persetujuan ASEAN MNP Tahun 2012 yang bertujuan menggunakan *common format* pada jadwal komitmen guna meningkatkan transparansi dan mempermudah implementasi komitmen ASEAN, tanpa mengubah komitmen Indonesia yang telah berlaku.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2025. Realisasi triwulan I dapat tercapai sesuai dengan nasional kalender forum kerja sama Regional tahun 2026 dan diprediksikan akan terus terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Perundingan DEFA	Terlaksana	- Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-16 telah dilaksanakan pada 13-17 Januari 2026 di Bangkok, Thailand. - Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-17 telah dilaksanakan pada 25-26 Februari 2026 secara virtual. - Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-18 telah dilaksanakan pada 8-10 Maret 2026 di Taguig City, Filipina.
2.	Legal Scrubbing DEFA	Terlaksana	<i>2nd Legal Expert Meeting (LEM)</i> dalam rangka <i>legal scrubbing text</i> ASEAN DEFA telah dilaksanakan dalam rangkaian Pertemuan ASEAN DEFA NC ke-18 telah dilaksanakan pada 8-10 Maret 2026 di Taguig City, Filipina.

3.	Menyusun Kertas Posisi Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Penyusunan kertas posisi telah diselesaikan untuk mendukung Pertemuan HLTF-EI ke-49 pada 25-27 Februari 2026 di Iloilo City, Iloilo, Filipina.
4.	Menyusun Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Penyusunan Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN telah diselesaikan pada 27 Februari 2026 yang merupakan <i>outcome</i> dari Pertemuan HLTF-EI ke-49.
5.	Menindaklanjuti Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan HLTF-EI, Indonesia telah menyampaikan masukan pada beberapa dokumen kepada Sekretariat ASEAN, yaitu: (1) <i>Draf MoU ASEAN-ADB</i> ; (2) <i>Concept Note: Study on the Assessment of Non-Tariff Measures (NTMs) on Selected Products in ASEAN</i> ; (3) <i>Draf AEC MEAL Framework 2045</i> ; (4) <i>Draf ToR ASEAN Geoeconomic Group</i> .
6.	Publikasi Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49	Terlaksana	Publikasi telah dilaksanakan melalui penyampaian Berita Biasa dalam bentuk Berita Faksimili Nomor B-00076/Manila/260305 tanggal 28 Februari 2026 serta situs dan media sosial Deputi

			Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
7.	Menyusun Kertas Posisi Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Penyusunan kertas posisi telah diselesaikan untuk mendukung Pertemuan APEC EC ke-1 2026 di Guangzhou, RRT, pada 8-9 Februari 2026.
8.	Penyampaian rekomendasi untuk Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Penyusunan Rekomendasi kepada <i>Senior Official Meeting</i> dalam bentuk <i>Report by the Chair of the Economic Committee on EC1</i> 2026 telah diselesaikan pada 9 Februari 2026 yang merupakan <i>outcome</i> dari Pertemuan APEC EC1.
9.	Menindaklanjuti Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Penyusunan dan Penyampaian AEPR 2026: <i>Structural Reform and AI-Driven Digital Transformation Individual Economy Report (IER) Questionnaire</i> pada 17 Maret 2026 kepada APEC <i>Policy Support Unit (PSU)</i> .
10.	Publikasi terkait Hasil Pertemuan APEC <i>Economic Committee</i> ke-1	Terlaksana	Penyampaian Berita Biasa dalam bentuk Berita Faksimili Nomor B-00049/GUANGZHOU/260213 tanggal 13 Februari 2026 perihal Laporan Pertemuan APEC <i>Economic</i>

			<i>Committee ke-1 (EC1) di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, tanggal 8 s.d. 9 Februari 2026.</i>
11.	Pembahasan dan Finalisasi substansi RPerpres Protokol Kedua AANZFTA dan ASEAN-MNP sebelum proses harmonisasi	Terlaksana	Telah dilakukan pembahasan dan finalisasi substansi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA dan ASEAN-MNP sebagai persiapan sebelum proses harmonisasi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan Posisi Indonesia pada the 17th ACAFTA TNC pada 3 Februari 2026 secara virtual.
2. Menghadiri 17th ACAFTA TNC *Meeting* pada 9 s.d. 13 Februari 2026.
3. Penyusunan dan Penyampaian AEPR 2026: *Structural Reform and AI-Driven Digital Transformation Individual Economy Report (IER) Questionnaire* pada 17 Maret 2026 kepada APEC Policy Support Unit (PSU).
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretariat ASEAN, serta kementerian/lembaga terkait dalam rangka pendalaman substansi, penyusunan masukan terhadap dokumen pembahasan, dan penyelesaian kebutuhan administrasi pelaksanaan forum kerja sama ekonomi Regional.
5. Melakukan koordinasi dengan Filipina selaku tuan rumah penyelenggara, termasuk panitia pelaksana dan *Liaison Officer* (LO), guna mendukung kelancaran pelaksanaan pertemuan HLTF-EI ke-49.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang ikut menjadi DELRI pada pertemuan, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 39.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan forum kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan II-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Isu-isu yang dibahas dalam forum HLTF-EI bersifat lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi dan penyelarasan posisi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.
2. Pada rangkaian pertemuan HLTF-EI ke-49 terdapat agenda baru berupa *Roundtable Discussion* yang belum pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga memerlukan pendalaman substansi serta penyusunan bahan pembahasan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait melalui rapat persiapan guna menyusun dan menyelaraskan posisi Indonesia terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam forum HLTF-EI dan APEC EC.
2. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta Sekretariat ASEAN untuk memperoleh informasi dan masukan dalam penyusunan bahan *Roundtable Discussion* dalam rangkaian Pertemuan HLTF-EI ke-49.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan; (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan

empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Kepuasan} \\ \text{Layanan Koordinasi,} \\ \text{Sinkronisasi dan} \\ \text{Pengendalian} \end{array} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2026. Adapun target triwulan I sebesar 3 dari 4 yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam pelayanan unit kerja dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional telah terealisasi sebesar 3,7 dari 4 atau mencapai 120% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Indeks	3 dari 4	3,7 dari 4	120% (memuaskan)

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional pada tahun 2026 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah melakukan survei Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan I tahun 2026. Berdasarkan penarikan hasil survei, diperoleh indeks kepuasan sebesar 3,7 artinya telah mencapai 120% dari target Baik (3 dari 4).

Proyeksi Triwulan I tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan I tahun 2025. Realisasi Triwulan I didorong oleh tingginya partisipasi aktif K/L mitra kerja dalam mengisi survei, sehingga data yang diperoleh menggambarkan

persepsi dan pengalaman nyata mereka dalam berkoordinasi dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara online dengan mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan survei dan pengisian jawaban, serta rekapitulasi hasil survei karena dilakukan secara serentak dalam satu tempat dan rentang waktu yang sama.

Responden diberikan petunjuk mengenai tata cara pengisian survei guna meminimalisir kesalahan teknis pada waktu mengisi kuesioner tersebut. Hasil pelaksanaan survei yakni berupa nilai indeks kepuasan yang diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah dilengkapi oleh responden, dengan empat kategori penilaian yakni (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Hasil dari pelaksanaan survei tersebut berupa tindaklanjut atas perbaikan layanan.

Adapun responden yang berpartisipasi pada survei ini adalah seluruh pejabat/pegawai baik ASN maupun Non ASN di lingkungan Kemenko Perekonomian, K/L dan/atau stakeholder terkait . Namun survei ini dikecualikan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan objektivitas penilaian survei.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Terlaksana	Telah dilakukan persiapan pelaksanaan survei, meliputi penyusunan instrumen survei, penetapan responden, serta koordinasi teknis untuk mendukung

			pelaksanaan survei kepuasan layanan.
2.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan I	Terlaksana	Survei kepuasan layanan Triwulan I telah dilaksanakan dan hasilnya telah diolah serta disusun dalam laporan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.
3.	Penguatan kapasitas SDM dalam berkoordinasi lintas K/L melalui penyamaan pemahaman substansi kerja sama ekonomi regional	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas SDM melalui penyamaan pemahaman substansi kerja sama ekonomi regional guna mendukung efektivitas koordinasi lintas kementerian/ lembaga.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam penyusunan indikator dan formulir survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan *Google Form*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp250.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja bahan sebagai penunjang kebutuhan kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan II-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tingkat partisipasi responden dalam pengisian survei belum optimal sehingga diperlukan upaya tindak lanjut untuk memperoleh jumlah responden yang memadai.

2. Perbedaan tingkat pemahaman pemangku kepentingan terhadap substansi kerja sama ekonomi regional memerlukan penyamaan persepsi secara berkelanjutan agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan pengingat (*reminder*) dan koordinasi secara berkala kepada responden selama periode pelaksanaan survei.
2. Meningkatkan kegiatan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dan penguatan kapasitas SDM terkait perkembangan isu kerja sama ekonomi regional.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%, dengan penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 20% ditetapkan berdasarkan tren progress atas cascading dari Program Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 23,53% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	92%	20%	21,73 % (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional ditargetkan sebesar 92%. Sampai dengan laporan ini disusun, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah terealisasi sebesar 20%.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan I tahun 2025. Realisasi triwulan I didorong oleh pemenuhan cascading atas target Reformasi Birokrasi dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Mengingat hal tersebut, maka diprediksikan target penyelenggaraan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dapat terpenuhi di triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan

			pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU yang telah diselesaikan di bulan Januari 2026.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan I.
3.	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Renja Tahun 2026 di bulan Januari 2026.
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama triwulan I.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri rapat penyusunan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual IKU baik secara internal di lingkungan Kedeputusan 2 maupun pembahasan secara langsung dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.
2. Melakukan pengisian capaian E-monev Renja triwulan I.
3. Menghadiri Rapat Pembahasan Pemutakhiran Renja 2027 pada 12 Februari 2026.
4. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Target 2026 dan Penilaian triwulan I bagi seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan pelaksanaan rapat pembahasan di dalam kantor atau *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp250.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja bahan sebagai penunjang kebutuhan kerja sama ekonomi Regional lainnya yang akan dilaksanakan pada triwulan II-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja memerlukan koordinasi dan konsolidasi data antarbidang kerja sama di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional untuk memastikan kesesuaian substansi dan target kinerja.
2. Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan persuratan dan disposisi belum optimal, sehingga sebagian proses disposisi masih dilakukan secara manual melalui media komunikasi lain.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antarbidang kerja sama dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja guna memastikan ketepatan waktu dan kualitas dokumen yang dihasilkan.
2. Mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan persuratan dan disposisi melalui sosialisasi, pendampingan, serta penerapan secara konsisten di lingkungan unit kerja.

Jakarta, 10 April 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional



Bobby Chriss Siagian